**ANALISIS KINERJA KOPERASI PADA ASPEK KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN JATIDIRI KOPERASI**

Nisa Maulida Ramadhani✉, Rusdarti

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel*Sejarah Artikel:*

Diterima Februari 2018

Disetujui Februari 2018

Dipublikasikan Maret 2018

*Keywords:**Cooperation; Cooperation Identity; Performance Assessment; Quality of Productive Assets Aspect***Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah usaha yang dijalankan dapat menjadikan koperasi untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memajukan kesejahteraan anggota dan memperdayakan perekonomian dan untuk mengetahui kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang bergerak di bidang simpan pinjam di Kabupaten Tegal tahun 2015 – 2016 diukur dengan menggunakan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi pada aspek Kualitas Aktiva Produktif dan Jatidiri Koperasi (Per. Dep. No. 06/Per/Dep.6/IV/2016). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kabupaten Tegal yang berjumlah 72 KPRI. Sampel dalam penelitian ini adalah koperasi yang telah melakukan tutup buku tahun 2016/2017 dan telah menyerahkan laporan RAT Tahun 2016/2017 sebanyak 21 KPRI. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan rasio keuangan. Hasil penelitian perhitungan rasio kinerja koperasi pada KPRI Se-Kota Kabupaten Tegal tahun 2015-2016 berdasarkan standar Per. Dep. No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 adalah pada tahun 2015 rata-rata skor yang diperoleh sebesar 79,17 poin termasuk ke dalam kategori cukup sehat. Sedangkan pada tahun 2016 rata-rata skor yang diperoleh sebesar 87,5 poin termasuk ke dalam kategori sehat.

Abstract

This study aims to assess if the business can grow and develop, so that it can advance the prosperity of its members and empower the economy and and for performance performance Cooperative Employees of the Republic of Indonesia (KPRI) engaged in savings and loan in Tegal regency 2015 - 2016 is undone by using indicators of health assessment of savings and credit cooperatives and cooperative savings and lending units on aspects of Earning Assets Quality and Cooperative Identity (Per Dep. 06 / Per / Dep.6 / IV / 2016). Population in this research is finance report from Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Tegal Regency as much as 72 KPRI. Sample of this research are cooperation that have closed their finance report 2016/2017 and have delivered their RAT report in 2016/2017, they are 21 KPRI. Data analysis method in this research is descriptive analysis quantitative with finance ratio. The result of this research in cooperation performance of KPRI Tegal regency 2015-2016 based on Per. Dep. No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 standard is in 2015 the average score acquired is 79.17 point, it is included in healthy enough category. Meanwhile, in 2016 the average score acquired is 87.5 point, it is included in healthy category.

© 2018 Universitas Negeri Semarang

□ Alamat korespondensi:

Gedung L2 Lantai 1 FE Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229
E-mail: dianarifiani24@gmail.com

p-ISSN 2252-6544
e-ISSN 2502-356X

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan pilar perekonomian Indonesia, eksistensi koperasi tercermin dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan" dan menurut pasal tersebut tipe perusahaan yang cocok dengan corak perekonomian Indonesia adalah koperasi. Koperasi sendiri pada dasarnya merupakan organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang – seorang demi kepentingan bersama. Sedangkan menurut "Bapak Koperasi Indonesia" Moh.Hatta, koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut Norendra (2013:29) dasar dari pendirian koperasi adalah kerjasama, baik oleh orang perorang maupun badan hukum. Dari sana terungkap bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari perlu mengadakan kerjasama dengan orang lain maupun pihak lain setiap hari secara terus berkelanjutan. Kerjasama yang dilakukan adalah berdasarkan kesamaan kebutuhan ataupun kesamaan kondisi ekonomi dari masing-masing anggota perkumpulan tersebut. Peran koperasi dirasa semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dalam upayanya menyusun suatu sistem ekonomi negara yang bersifat kekeluargaan, tidak hanya menggunakan koperasi sebagai sarana untuk mengimbangi sistem kapitalisme. Pemberian peranan yang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan negara sebagai sarana utama dalam upaya menetralkan sektor swasta yang cenderung kapitalis, bukanlah karena ekonomi kolektivitas yang dikembangkan oleh

pemerintah mengarah pada kolektivisme komunis melainkan karena kematangan bangsa secara keseluruhan untuk mengembangkan sistem ekonomi kekeluargaan dalam bentuk-bentuk koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa belum cukup kuat. (Zamakhsyari Dhofiler, 1990:42 dalam Rusdarti 2009:8).

Sebagai badan usaha rakyat yang paling direkomendasikan oleh undang-undang, koperasi diharapkan mampu untuk bersaing dengan jenis badan usaha lain yaitu BUMN dan BUMS. Dengan berlandaskan prinsip koperasi, diharapkan koperasi dapat memperkuat posisinya sebagai penyokong utama ekonomi Negara atau sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Tujuan akhir koperasi agar mampu bersaing dengan badan usaha lain dan mampu menjadi soko guru perekonomian Indonesia adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat pada umumnya, dan bagi anggota koperasi pada khususnya. Tujuan ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945 (Norendra 2013:29).

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai badan usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektivitas kegiatan usahanya terutama efektivitas operasional, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standart dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001: 416). Selain itu, Oktaviansyah (2015) juga mengemukakan bahwa banyak faktor yang menghambat pertumbuhan koperasi di Indonesia karena pengembangan dan pemberdayaan koperasi sulit untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan, meningkatkan kerjasama, potensi, serta kemampuan ekonomi anggotanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Akhir-akhir ini koperasi memiliki kinerja yang semakin menurun dan keberadaannya yang kurang aktif dimasyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu alat ukur

untuk mengukur kinerja sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi dan sasaran yang telah ditentukan dapat tercapai.

Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar” Dengan menilai kinerja keuangan, perusahaan dapat mengetahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Kinerja perusahaan adalah gambaran posisi keuangan perusahaan dan menunjukkan hasil usaha selama periode tertentu, yang diperoleh dengan melakukan analisa laporan keuangan.

Untuk mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan, analisis keuangan dan pemakaian laporan keuangan harus melakukan analisis terhadap kesehatan perusahaan (Darsono dan Ashari, 2005:27). Penilaian kinerja suatu perusahaan merupakan proses analisis data selain sebagai alat pertanggungjawaban, juga diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Bagi pemilik perusahaan, penilaian kinerja diperlukan untuk memberikan penilaian apakah investasinya tetap dipertahankan atau tidak. Bagi para kreditor, penilaian kinerja diperlukan untuk memberikan informasi apakah suatu perusahaan memiliki kemampuan membayar tepat waktu. Bagi karyawan, penilaian kinerja perusahaan memberikan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan sebagai tempat menggantungkan hidupnya (Darsono dan Ashari, 2005:11-12).

Putri Handayani (2002) mengemukakan penilaian kinerja koperasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena untuk menilai sejauh mana kinerja, kelayakan usaha, dan kelangsungan hidup dari koperasi tersebut. Penilaian kinerja suatu perusahaan merupakan proses analisis data selain sebagai alat pertanggungjawaban, juga diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Bagi pemilik perusahaan, penilaian kinerja diperlukan untuk memberikan penilaian apakah

investasinya tetap dipertahankan atau tidak. Bagi para kreditor, penilaian kinerja diperlukan untuk memberikan informasi apakah suatu perusahaan memiliki kemampuan membayar tepat waktu. Bagi karyawan, penilaian kinerja perusahaan memberikan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan sebagai tempat menggantungkan hidupnya (Darsono dan Ashari, 2005:11-12).

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan untuk mengukur kinerja koperasi dapat digunakan dengan melihat laporan keuangan dan non keuangannya, sedangkan untuk mengukur evaluasi dan kondisi keuangan perusahaan dapat melakukan analisis tingkat kesehatan koperasi. Selain itu, dengan adanya penilaian kinerja kita dapat menganalisis dan mengetahui sejauh mana rancangan, strategi dan sasaran dapat tercapai. Dengan adanya penilaian kinerja diharapkan seluruh elemen yang terlibat didalam suatu perusahaan dapat mengetahui kinerja perusahaannya. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 6/Per/Dep.6/IV/206 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi menjadi alat untuk mengukur kinerja koperasi khususnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP). Dalam pedoman tersebut, ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 7 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan dan aspek jatidiri koperasi. Dalam ke 7 aspek tersebut, yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah aspek kualitas aktiva produktif dan jatidiri koperasi. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masalah dalam kedua aspek tersebut, diantaranya piutang macet dan SHU yang fluktuatif sehingga menyebabkan anggota kurang merasakan manfaat dari adanya koperasi.

Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki banyak koperasi. Sampai Februari 2017 tercatat terdapat 643 koperasi yang berada di Kabupaten Tegal yang terdiri dari koperasi jasa, konsumsi,

produksi dan simpan pinjam. Dari koperasi tersebut sebanyak 312 koperasi merupakan koperasi aktif, 331 koperasi merupakan koperasi tidak aktif dan sampai bulan tersebut baru 144 koperasi yang sudah melaksanakan RAT (Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Tegal). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa 51,5% koperasi di Kabupaten Tegal tidak aktif, yang artinya koperasi di Kabupaten Tegal memiliki permasalahan, terbukti dengan jumlah koperasi tidak aktif lebih banyak dibandingkan dengan jumlah koperasi yang aktif. Selain itu, dari data tersebut diketahui juga bahwa koperasi yang paling konsisten keaktifannya di Kabupaten Tegal merupakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI).

Namun, tidak jauh berbeda dengan koperasi pada umumnya, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang merupakan koperasi pegawai negeri juga memiliki permasalahan yang sama. Dibuktikan dengan data dari Dinas Koperasi di Kabupaten Tegal yang menunjukkan dari 72 KPRI di Kabupaten Tegal, terdapat 7 KPRI yang tergolong pasif. Menurut Bapak Suroso selaku Kepala Dinas Koperasi, pada KPRI yang tergolong pasif disebabkan oleh beberapa permasalahan didalamnya seperti; (a) pensiun pegawai dan mutasi yang menyebabkan karyawan atau pengurus mengalami kesulitan dalam menagih piutang yang dimiliki pegawai yang telah pensiun atau mutasi, ditambah lagi kebanyakan pengurus merupakan PNS sehingga mereka kurang fokus dalam melaksanakan tugas, (b) tidak semua KPRI buka pada saat jam kerja, hal ini dikarenakan tidak semua KPRI memiliki karyawan selain dari PNS, sehingga pelayanan terhadap anggota belum dilakukan dengan baik, (c) KPRI kurang dapat mengembangkan pada sektor usaha lain, hal ini dikarenakan terbatasnya lahan dan juga modal di dalam koperasi, (d) masih menggunakan sistem kontinyasi dalam menyediakan penjualan barang.

Permasalahan KPRI tersebut memang tidak lepas dari pengurus dan pengawas di dalam koperasi itu sendiri, namun semestinya KPRI dapat menyelesaikan permasalahannya melalui evaluasi kinerja dalam RAT yang dilakukan setiap tahun. Setelah melakukan

observasi awal di KPRI Kabupaten Tegal, ditemukan permasalahan yang hampir sama yaitu pengurus maupun karyawan koperasi memiliki kesulitan untuk mengetahui kekurangan dan permasalahan di dalam koperasi karena penilaian koperasi yang mereka lakukan masih sebatas penilaian kinerja dari segi keuangan, penilaian laporan dengan analisa Rentabilitas, Likuiditas dan Solvabilitas (RLS) dan juga penilaian rutin yang dilakukan dinas terkait kurang rinci sehingga tidak banyak KPRI yang melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaannya. Dari observasi tersebut juga belum dijumpai KPRI yang melakukan pengukuran kinerja yang menekankan pada Aspek Kualitas Aktiva Produktif dan Jatidiri Koperasi, yaitu sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 6/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Padahal kedua aspek tersebut di Kabupaten Tegal merupakan permasalahan utama, karena masih banyak KPRI yang memiliki piutang macet dan banyak anggota KPRI yang kurang puas dengan SHU KPRI. Sampai saat ini, masih banyak KPRI di Kabupaten Tegal yang belum bisa mengatasi permasalahan tersebut, oleh karena itu perlu adanya penilaian kinerja koperasi yang menekankan pada aspek kualitas aktiva produktif dan jatidiri koperasi.

Penilaian kinerja koperasi sangat perlu dilakukan di setiap koperasi, hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan dan kegiatan yang telah dicapai selama satu periode. Kemudian selain itu, dengan adanya penilaian kinerja, juga dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan maupun anggota dalam membuat keputusan apa yang akan dilakukan untuk perkembangan koperasi. Berbagai permasalahan tersebut sebenarnya tidak dapat menjadikan KPRI tidak berkembang atau menjadi pasif. Hal ini dikarenakan sistem yang ada di dalam KPRI dalam menjalankan usaha simpan pinjam menggunakan sistem pembayaran potong gaji, sehingga permasalahan KPRI seharusnya dapat diminimalisir. Namun meskipun demikian, setelah melakukan observasi di Dinas terkait,

tercatat ada beberapa KPRI yang mengalami permasalahan piutang macet. Hal ini dibuktikan dengan data berikut:

Tabel 1.Piutang Macet KPRI Kabupaten Tegal

No	Nama KPRI	2015	2016	%Kenaikan/Penurunan
1	Harapan	Rp 898.866.300	Rp 991.287.598	10,28%
2	Serba Guna	Rp 35.890.100	Rp 46.982.500	30,91%
3	Harapan Kita	Rp 24.567.959	Rp 19.767.950	(19,53%)
4	Bakti Husada	Rp 805.631.127	Rp 962.328.985	19,45%
5	Prima Widya Usaha	Rp 140.350.523	Rp 144.170.523	2,72%

Sumber: Observasi Tahun 2017

Dari data tersebut, dapat kita ketahui bahwa beberapa KPRI di Kabupaten Tegal memiliki jumlah piutang macet yang lumayan tinggi. Di beberapa KPRI bahkan memiliki permasalahan piutang macet yang belum bisa terselesaikan dengan baik sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan data observasi yang menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah piutang macet di beberapa KPRI seperti KPRI Harapan, KPRI Serba Guna, KPRI Bakti Husada, dan KPRI Prima Widya Usaha. Hanya KPRI Harapan Kita yang mengalami penurunan jumlah piutang macet. Dari data observasi, tercatat KPRI Serba Guna mengalami peningkatan piutang macet paling tinggi yaitu sebesar 30,91%, sedangkan penurunan jumlah piutang macet pada KPRI Harapan kita sebesar 19,53%.

Piutang macet sendiri dapat diketahui dari laporan RAT koperasi yang dapat digunakan untuk menilai kualitas aktiva

produktif (KAP) perusahaan atau koperasi. Joko Pramono (2015: 28) mengemukakan bahwa kualitas aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi yang bersangkutan. Aktiva produktif yang diklasifikasikan adalah jumlah aktiva produktif yang kolebilitasnya tidak lancar. Oleh karena itu penanaman dana dan kesiapan KSP dalam menanggung kemungkinan timbulnya resiko kerugian penanaman dana tersebut, mempunyai peranan penting dalam menunjang usaha operasional KSP.

Selain aspek kualitas aktiva produktif (KAP), terdapat suatu permasalahan di dalam KPRI yang berhubungan dengan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggota di masing-masing KPRI di Kabupaten Tegal. Permasalahan tersebut dapat dibuktikan dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.Sisa Hasil Usaha KPRI Kabupaten Tegal

No	Nama KPRI	2015	2016	%Kenaikan/Penurunan
1	Harapan	Rp 120.000.000	Rp 112.500.000	(6,25%)
2	Serba Guna	Rp 9.500.000	Rp 10.000.000	5,26%
3	Harapan Kita	Rp 3.870.000	Rp 5.538.000	43,10%
4	Bakti Husada	Rp 637.544.966	Rp 567.529.212	(10,98%)
5	Prima Widya Usaha	Rp 132.200.588	Rp 103.750.664	(21,52%)

Sumber: Observasi Tahun 2017

Dari data di atas dapat di lihat bahwa kinerja sebagian dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) bila dilihat dari

besarannya Sisa Hasil Usaha (SHU) mengalami peningkatan di beberapa koperasi. Hal itu dapat di lihat pada KPRI Serba Guna dan KPRI

Harapan Kita dimana pada koperasi tersebut terjadi kenaikan di setiap tahun. Kenaikan SHU terbesar terjadi pada KPRI Harapan Kita yaitu mencapai 43,10%. Akan tetapi terdapat pula koperasi yang mengalami penurunan kinerja apabila dilihat dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yaitu pada KPRI Harapandimana terjadi penurunan yaitu dari Rp. 120.000.000 pada tahun 2015 menjadi Rp. 112.500.000 atau turun sebesar 6,25% pada tahun 2016. Selain itu penurunan juga terjadi pada KPRI Bakti Husada yaitu SHU pada tahun 2015 sebesar Rp 637.544.966 menjadi Rp 567.529.212 atau turun sebesar 0,98% pada tahun 2016. Dan yang terakhir, penurunan juga terjadi pada KPRI Prima Widya Usaha yaitu SHU pada tahun 2015 sebesar Rp 132.200.588 menjadi Rp 103.750.664 atau 21,52% pada tahun 2016. Sisa Hasil Usaha akan berpengaruh terhadap kinerja koperasi terutama pada aspek jatidiri koperasi. Hal ini dikarenakan jatidiri koperasi merupakan tujuan dari sebuah koperasi dalam mempromosikan ekonomi anggotanya. Apabila SHU naik, maka anggota koperasi meningkat kesejahteraannya (ekonominya) sedangkan apabila SHU turun maka anggota koperasi tidak lebih sejahtera dari tahun sebelumnya yang berarti KPRI dinilai gagal karena tidak dapat mencapai tujuan dari jatidiri koperasi.

Meskipun banyaknya permasalahan yang dialami koperasi di Kabupaten Tegal, sebenarnya banyak potensi yang dapat dimanfaatkan oleh koperasi-koperasi di Kabupaten Tegal. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat di Kabupaten Tegal yang berwirausaha dan memiliki unit usaha yang cukup berkembang. Apabila masyarakat mau bekerja sama dengan koperasi, maka bukan suatu ketidakmungkinan koperasi di Kabupaten Tegal dapat berkembang dengan cepat dan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Selain itu, menurut Kepala Dinas Koperasi, minat masyarakat Kabupaten Tegal terhadap koperasi cukup tinggi. Mereka merasa senang apabila menggunakan jasa koperasi yang dianggapnya tidak mempersulit mereka dalam melakukan peminjaman maupun dalam memenuhi kebutuhan mereka. Selain itu dengan adanya penilaian kinerja pada aspek kualitas aktiva

produktif dan jatidiri koperasi diharapkan hasil dari penilaian tersebut dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menyusun strategi dan bahan evaluasi untuk mengembangkan koperasi supaya lebih baik lagi, terutama dalam aktiva produktif dan SHU nya.

Dari berbagai masalah dan uraian di atas, serta dalam rangka memberikan umpan balik kepada KPRI se Kabupaten Tegal agar dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, maka perlu dilakukan analisis kinerja koperasi dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas “Analisis Kinerja Koperasi Pada Aspek Kualitas Aktiva Produktif dan Jatidiri Koperasi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) se Kabupaten Tegal”.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai apakah usaha yang dijalankan dapat menjadikan koperasi untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat memajukan kesejahteraan anggota dan untuk mengetahui kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang bergerak di bidang simpan pinjam di Kabupaten Tegal tahun 2015 – 2016 diukur dengan menggunakan pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi pada aspek Kualitas Aktiva Produktif dan Jatidiri Koperasi (Per. Dep. No. 06/Per/Dep.6/IV/2016).

METODE

Berdasarkan karakteristik masalahnya jenis penelitian yang dilaksanakan adalah termasuk jenis penelitian deskriptif yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi (Suharsimi 2006:108). Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya (Sugiyono 2015:117). Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang terdapat di Kabupaten Tegal yang berjumlah 72 KPRI. Sampel adalah bagian dari

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2015:118). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan pertanggung jawaban pengurus (RAT) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) yang terdapat di Kabupaten Tegal selama tahun 2015-2016.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel yang berdasarkan pertimbangan subyektif penelitian yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria sampel yang termasuk dalam penelitian ini adalah : KPRI yang menjadi anggota PKPRI se- Kabupaten Tegal; (1) KPRI tersebut telah melakukan RAT tutup buku 2015/2016 dan masuk ke dalam klasifikasi A atau B (sehat atau cukup sehat); (2) KPRI yang mencantumkan data laporan keuangan yang lengkap; (3) Kebijakan dari PKPRI se-Kabupaten Tegal. Berdasarkan kriteria klasifikasi koperasi tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah koperasi yang telah melakukan tutup buku tahun 2015/2016 dan telah menyerahkan laporan RAT tahun 2015/2016 pada Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kabupaten Tegal sebanyak 21 KPRI.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang terlebih dahulu dikumpulkan, dilaporkan oleh orang lain yang berada diluar penyidik itu sendiri. Data yang diperoleh berupa data laporan rugi-laba 21 KPRI di Kabupaten Tegal tahun 2015 dan 2016 dan data laporan keuangan atau neraca 21 KPRI di Kabupaten Tegal tahun 2015 dan 2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto 2013: 274). Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui kinerja KPRI se- Kabupaten Tegal.

Analisis data dilakukan dengan cara analisis deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif adalah analisis yang berwujud angka-angka hasil perhitungan atau pengukuran berupa rasio keuangan yang digunakan untuk menggabungkan atau menerangkan hasil

penelitian yang diuraikan yaitu membandingkan antara rasio hasil kinerja keuangan KPRI se Kabupaten Tegal dengan rasio standar dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 untuk menilai kinerja keuangan. Aspek yang diteliti dalam penelitian ini adalah aspek kualitas aktiva produktif dan jatidiri koperasi yang terdiri dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan, rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Penilaian terhadap kinerja keuangan dilakukan dengan menghitung rasio-rasio yang menjadi indikator-indikator dari kinerja keuangan koperasi untuk kemudian dimasukkan dalam salah satu kriteria. Kinerja KJKS/UJKS koperasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80,00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam Pengawasan
$< 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: Per Dep No.06/Per/Dep.6/IV/2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

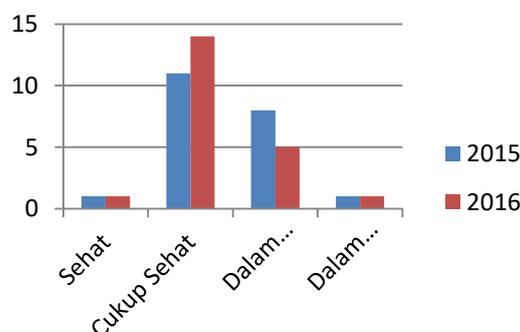
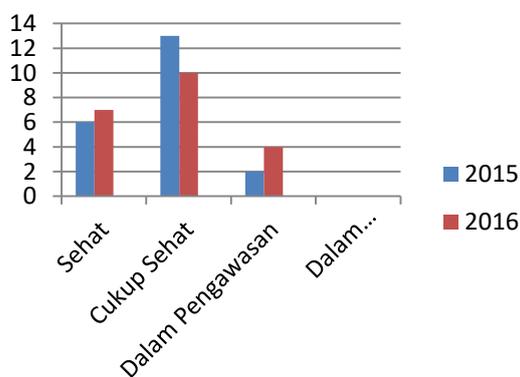
Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui kinerja keuangan KPRI Kabupaten Tegal tahun 2015-2016. Dalam mengadakan analisis terhadap laporan keuangan koperasi diperlukan sebuah ukuran atau parameter. Tolak ukur yang sering digunakan dalam analisis kinerja keuangan adalah analisis rasio. Rasio ini dapat diketahui dari laporan keuangan yang sudah ada. Dari perhitungan rasio yang telah didapat maka selanjutnya dibandingkan dengan parameter yang digunakan. Sebagai alat untuk mengukur kinerja KPRI se Kabupaten Tegal dalam pembahasan ini menggunakan kriteria atau standar pengukuran kinerja keuangan dari Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman

Penilaian Kesehatan Koperasi Simmpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam yang disajikan dalam tabel rekapitulasi kinerja KPRI se Kabupaten Tegal dapat dilihat dari rasio keuangan tahun 2015-2016.

Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa KPRI dinilai sehat apabila skor yang diperoleh $\geq 80\%$. Sedangkan hasil penelitian menunjukkan KPRI di Kabupaten Tegal rata-rata skor yang di peroleh pada tahun 2015 sebesar 73,32 dan untuk tahun 2016 rata-rata sebesar 73,29 dari rata-rata tersebut dapat di lihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun, kinerja KPRI di Kabupaten Tegal pada aspek kualitas aktiva produktif dan jatidiri koperasi belum mengalami peningkatan, kriteria yang di dapatkan pun tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada kriteria cukup sehat. Kenaikan dan penurunan skor dalam rasio di masing-masing aspek merupakan penyebab utama mengapa Kinerja KPRI di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 2 tahun tersebut tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa KPRI di Kabupaten Tegal pada aspek kualitas aktiva produktif dan jatidiri koperasi di nilai belum mampu memenuhi kesejahteraan anggota dan belum mampu mengurangi permasalahan-permasalahan di dalam koperasi terutama pada piutang macet dan SHU secara optimal.

Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa KPRI dinilai sehat apabila skor yang diperoleh $\geq 80\%$. Sedangkan hasil kinerja KPRI di Kabupaten Tegal dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif, pada tahun 2015 diperoleh rata-rata skor 16,51 dari total skor 20 dan untuk tahun 2016 sebesar 16,75 dari total skor 20. Hasil dalam penelitian ini yaitu pada tahun 2015 sebanyak 1 atau 5% koperasi masuk ke dalam kondisi sehat, 11 atau 52% koperasi masuk ke dalam kriteria cukup sehat, 8 atau 38% koperasi masuk ke dalam kriteria dalam pengawasan dan 1 atau 5% koperasi masuk ke dalam kriteria dalam pengawasan khusus. Sedangkan untuk tahun 2016 sebanyak 1 atau 5% koperasi masuk ke dalam kriteria sehat, 14 atau 67% masuk ke dalam kriteria cukup sehat, 5 atau 24% koperasi masuk ke dalam kriteria dalam pengawasan, dan 1 atau 5% koperasi masuk ke dalam kriteria dalam pengawasan khusus.

Hasil tersebut menunjukkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang baik, meskipun perbedaan poin rata-rata tidak begitu jauh. Dan di tahun terakhir kinerja pada aspek kualitas aktiva produktif ini KPRI yang masuk ke dalam kriteria sehat meningkat sebanyak 4 koperasi yang sebelumnya hanya 10 koperasi menjadi 14 koperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga KPRI tersebut sudah memiliki solusi untuk mengatasi mitra pembiayaan yang terlambat bayar, bisa menarik semua dana yang mereka berikan kemasyarakat maupun piutang macet yang disebabkan oleh adanya pensiun atau kematian anggota koperasi. Namun, karena kriteria yang didapatkan masih masuk ke dalam kriteria cukup sehat, jadi perlu adanya perhatian dari anggota koperasi dalam meningkatkan ketertiban dalam membayar tagihan dan pengurus koperasi perlu meningkatkan kualitas dalam pelayanan simpan pinjam.



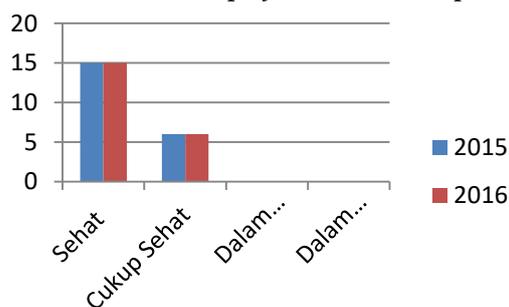
Gambar 1. Hasil Penilaian Kinerja pada aspek KAP dan Jatidiri Koperasi 2015-2016

Sumber : Data diolah 2017

Gambar 2. Penilaian Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan dikatakan sehat apabila hasil dari analisis rasio ini lebih dari 75% dan skor maksimal sebesar 10. Setelah dilakukan analisis data, di peroleh skor dari KPRI, skor rata-rata yang diperoleh KPRI di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 sebesar 9,29 dan untuk tahun 2016 sebesar 9,29, kategori yang di dapatkan dari tahun 2015 ke tahun 2016 masuk ke dalam kategori yang sama yaitu sehat. Pada rasio ini menandakan bahwa KPRI sudah dinilai baik karena nilai pinjaman anggota tidak melebihi jumlah pinjaman yang diberikan koperasi. Sehingga koperasi masih mampu dalam memberikan pinjaman secara optimal.

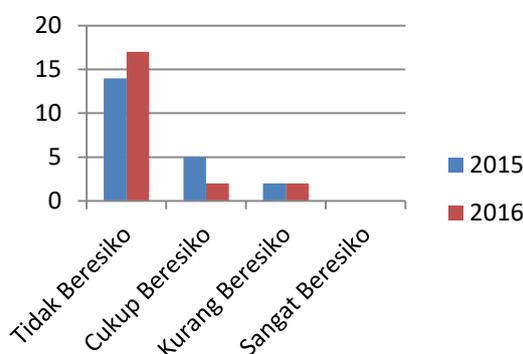


Gambar 3. Hasil Penilaian Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Pinjaman yang Diberikan

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan dikatakan tidak beresiko apabila memiliki rasio 0% dan mendapatkan skor 5,0 sedangkan apabila koperasi mendapatkan rasio lebih dari 45% skor yang didapat adalah 0 yang termasuk kedalam kategori sangat beresiko. Setelah dilakukan penilaian diperoleh rata-rata hasil yaitu pada tahun 2015 sebesar 3,67 dan pada tahun 2016 sebesar 3,76. Rata-rata yang dihasilkan dari perhitungan tahun 2015 adalah KPRI masuk ke dalam kriteria kurang beresiko, sedangkan pada tahun 2016 rata-rata yang dihasilkan mengalami peningkatan yang membawa kenaikan pada

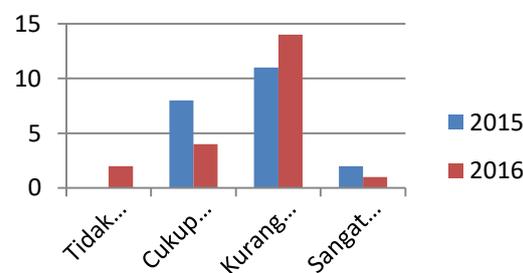
kriteria yang dihasilkan yaitu masuk ke dalam kriteria tidak beresiko. Hal ini berarti resiko pinjaman bermasalah dari tahun ke tahun dapat diminimalisir di KPRI Kabupaten Tegal.



Gambar 4. Hasil Penilaian Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Diberikan

Sumber : Data diolah 2017

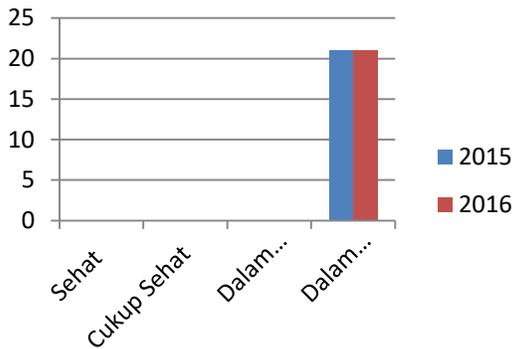
Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dikatakan sangat beresiko apabila memiliki rasio 0-20% dan mendapatkan skor 0-1,25 sedangkan apabila koperasi mendapatkan rasio lebih dari 71%, koperasi termasuk kedalam kategori tidak beresiko. Setelah dilakukan penilaian diperoleh rata-rata hasil yaitu pada tahun 2015 sebesar 2,3 dan untuk tahun 2016 sebesar 2,4, dalam kurun waktu 2 tahun tersebut, KPRI masuk ke dalam kriteria cukup beresiko. Hal ini menandakan bahwa cadangan risiko yang dimiliki KPRI di Kabupaten Tegal belum mampu menutup risiko pinjaman bermasalah, hal ini dikarenakan jumlah pinjaman bermasalah di beberapa KPRI di Kabupaten Tegal lebih tinggi dari jumlah cadangan risiko.



Gambar 5. Hasil Penilaian Rasio Cadangan Risiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Sumber: Data diolah 2017

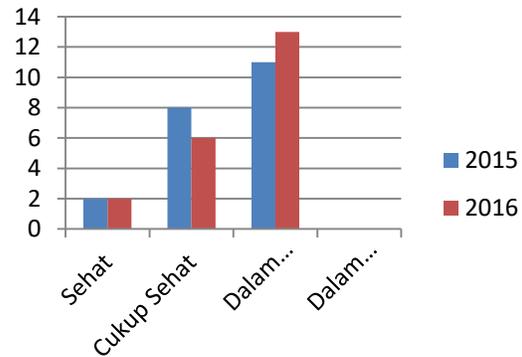
Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan dikatakan dalam pengawasan khusus apabila memiliki rasio lebih dari $> 30\%$ dan mendapatkan skor 1,25 sedangkan apabila koperasi mendapatkan rasio kurang dari $< 21\%$, koperasi termasuk kedalam kategori sehat. Setelah dilakukan penilaian diperoleh rata-rata hasil yaitu pada tahun 2015 sebesar 1,25 dan untuk tahun 2016 sebesar 1,25. Dalam kurun waktu 2 tahun semua KPRI di Kabupaten Tegal pada rasio ini masuk ke dalam kriteria dalam pengawasan khusus, hal ini disebabkan jumlah perbandingan pinjaman yang diberikan dengan pinjaman yang beresiko memiliki nilai yang besar.



Gambar 6. Hasil Penilaian Rasio Pinjaman yang Beresiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan
Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa KPRI pada aspek jatidiri koperasi di nilai sehat apabila skor yang di peroleh $\geq 80\%$. Sedangkan hasil kinerja KPRI dari aspek jatidiri koperasi untuk tahun 2015 diperoleh rata-rata skor 6,21 poin dari total skor total 10 poin dan tahun 2016 sebesar 6,04

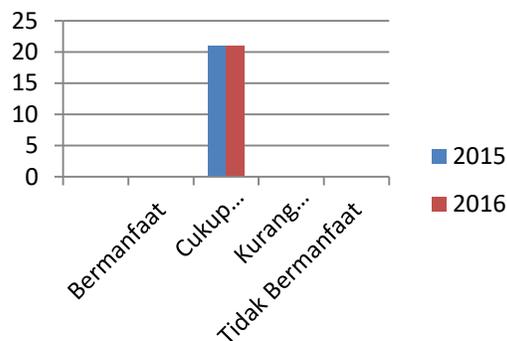
poin dari total 10 poin. Berdasarkan data yang ada secara rata-rata KPRI-KPRI di Kabupaten Tegal selama 2 tahun masuk pada kriteria dalam pengawasan, meskipun secara rata-rata dalam pengawasan, akan tetapi ada KPRI yang masuk kategori sehat dan cukup sehat, hal utama yang mempengaruhi KPRI masuk dalam kriteria dalam pengawasan adalah rasio promosi ekonomi anggota yang rendah ini berarti KPRI tersebut kurang besar dalam memberikan manfaat dan kepuasan pada anggota. Partisipasi anggota sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pada aspek jatidiri koperasi, sehingga karyawan maupun pengurus koperasi perlu meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan usaha yang dimiliki KPRI, sehingga SHU yang dihasilkan lebih besar dan peningkatan kesejahteraan anggota dapat tercapai.



Gambar 7. Hasil Penilaian Aspek Jatidiri Koperasi
Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa KPRI dikatakan bermanfaat pada rasio partisipasi bruto apabila rasio PEA di KPRI ini lebih dari 75% dan akan mendapatkan skor sebesar 7. Setelah dilakukan penilaian, di peroleh hasil rata-rata yaitu pada tahun 2015 sebesar 5,25 dan pada tahun 2016 sebesar 5,25, yang artinya dalam kurun waktu 2 tahun, KPRI masuk ke dalam kriteria cukup sehat. Pada rasio ini semua KPRI di

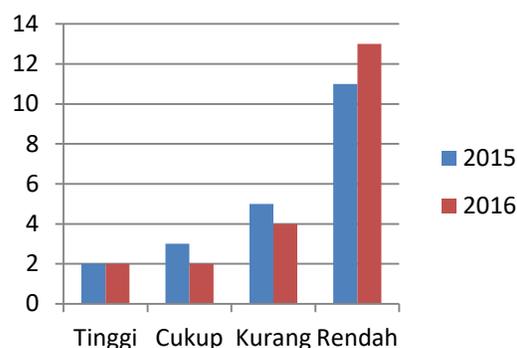
Kabupaten Tegal masuk ke dalam kriteria cukup sehat, hal ini dikarenakan pendapatan bruto dan pendapatan yang dimiliki KPRI cukup baik.



Gambar 8. Hasil Penilaian Rasio Partisipasi Bruto

Sumber: Data diolah 2017

Berdasarkan standar yang ditetapkan Peraturan Deputi No. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam bahwa KPRI dikatakan tinggi pada rasio promosi ekonomi anggota apabila rasio PEA di KPRI ini lebih dari 10% dan akan mendapatkan skor 3 poin. Setelah dilakukan penilaian pada KPRI di Kabupaten Tegal diperoleh hasil rata-rata yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,96 dan tahun 2016 sebesar 0,79, kriteria yang dihasilkan dari penilaian dalam kurun waktu 2 tahun tetap sama yaitu rendah. Hal ini menandakan bahwa KPRI belum mampu meningkatkan promosi ekonomi anggotanya, anggota di nilai belum puas (sejahtera) dalam menjadi anggota koperasi. KPRI perlu memperhatikan dan meningkatkan usaha dan pelayanan, sehingga anggota tertarik dan aktif dalam menggunakan jasa koperasi.



Gambar 9. Hasil Penilaian Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Sumber: Data diolah 2017

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja keuangan dari variabel – variabel yang di teliti pada KPRI se Kabupaten Tegal tahun 2015-2016 dapat diambil kesimpulan bahwa (1) Dilihat dari kinerjanya pada aspek kualitas aktiva produktif dan jatidiri koperasi, rata-rata skor yang diperoleh KPRI di Kabupaten Tegal pada tahun 2015 sebesar 73,32 dan untuk tahun 2016 rata-rata sebesar 73,29 dari rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2 tahun, kinerja KPRI di Kabupaten Tegal pada aspek kualitas aktiva produktif dan jatidiri koperasi belum mengalami peningkatan, kriteria yang di dapatkan pun tidak mengalami perubahan, yaitu tetap pada kriteria cukup sehat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa KPRI di Kabupaten Tegal di nilai belum mampu memenuhi kesejahteraan anggota dan belum mampu mengurangi permasalahan-permasalahan di dalam koperasi terutama pada piutang macet dan SHU secara optimal. Selanjutnya dilihat dari masing-masing aspek yaitu; (a) Kinerja KPRI di Kabupaten Tegal dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif, pada tahun 2015 diperoleh rata-rata skor 16,51 dari total skor 20 dan untuk tahun 2016 sebesar 16,75 dari total skor 20. Hasil tersebut menunjukkan dari tahun ke tahun mengalami

peningkatan yang baik, meskipun perbedaan poin rata-rata tidak begitu jauh. Dan di tahun terakhir kinerja pada aspek kualitas aktiva produktif ini KPRI yang masuk ke dalam kriteria sehat meningkat sebanyak 4 koperasi yang sebelumnya hanya 10 koperasi menjadi 14 koperasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga KPRI tersebut sudah memiliki solusi untuk mengatasi mitra pembiayaan yang terlambat bayar, bisa menarik semua dana yang mereka berikan ke masyarakat maupun piutang macet yang disebabkan oleh adanya pensiun atau kematian anggota koperasi, (b) Kinerja KPRI dari aspek jatidiri koperasi untuk tahun 2015 diperoleh rata-rata skor 6,21 poin dari total skor total 10 poin dan tahun 2016 sebesar 6,04 poin dari total 10 poin. Berdasarkan data yang ada secara rata-rata KPRI-KPRI di Kabupaten Tegal selama 2 tahun masuk pada kriteria dalam pengawasan, meskipun secara rata-rata dalam pengawasan, akan tetapi ada KPRI yang masuk kategori sehat dan cukup sehat, hal utama yang mempengaruhi KPRI masuk dalam kriteria dalam pengawasan adalah rasio promosi ekonomi anggota yang rendah, ini berarti KPRI tersebut kurang besar dalam memberikan manfaat dan kepuasan pada anggota.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Darsono dan Ashari.(2005). *Pedoman Praktis Memahami laporan Keuangan*.Yogyakarta: Andi.
- Fahmi, Irham. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, Putri. (2012). *Penilaian Kinerja Koperasi Karyawan Puri Sakti Grup Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14/Per/M.KUKM/II/2009*. Jurnal.Semarang: Universitas Dian Nuswantoro.
- Mulyadi. Akuntansi Manajemen. 2001. Jakarta : Erlangga.
- Norendra, Wandha, Rosa., Prishardoyo, Bambang., dan Muhsin. (2013). Analisis Kinerja KPRI pada Aspek Kerjasama Antar KPRI dan pada Aspek Kepedulian terhadap Komunitas KPRI di Kabupaten Pemalang. *Economic Education Analysis Journal*, 2 (1).
- Oktaviansyah,H.T. (2015). *Desain Balance Scorecard di (KUD) Subur Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi*.Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 06/Per/Dep.6/IV/2016.
- Pramono, J., & Budiyati. (2015). *Analisis Kinerja Koperasi Berdasarkan Tingkat Kesehatan Sesuai PERMENKOP No. 14/Per/M.KUKM/II/2009*. Jurnal Among Makarti, Volume 8 No. 15. Hal 25-53 Salatiga: STIE AMA Salatiga.
- Rusdarti. (2009). Pengaruh Keterlibatan Pembina, Kemampuan Pengurus dan Partisipasi Anggota Terhadap Kinerja Keuangan Koperasi Pondok Pesantren. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 2 (1).
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 1.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian.